

PENGEMBANGAN PULAU KECIL PERBATASAN (KAJIAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN PADA PULAU LIRANG)

Femsy Kour *)

Universitas Hein Namotemo. Jalan Kompleks Pemerintahan Halmahera Utara Villa Vak-1, Tobelo

*) E-mail: kourfemsy@ymail.com

ABSTRAK

Kehidupan ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di Negara tetangga. Di kawasan perbatasan Pulau Lirang, sulitnya aksesibilitas memunculkan kecenderungan masyarakat khususnya nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat di Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil yang tepat sesuai dengan potensi, karakteristik, dan permasalahan yang dimiliki daerah tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis kondisi ekonomi masyarakat Pulau Lirang menggunakan metode Analisis Tukar Nelayan (NTN), menganalisis kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, serta merumuskan strategi pengembangan Pulau Lirang menggunakan metode analisis kebijakan publik (Dunn, 1994) dan analisis SWOT. Secara umum nelayan Lirang yang adalah nelayan perbatasan memiliki distribusi NTN di atas angka satu, dan dapat disimpulkan bahwa nelayan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan subsistennya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, dan menabung dalam bentuk investasi barang. Beberapa kebijakan yang turut mendukung pengembangan Pulau Lirang sebagai Pulau kecil perbatasan antara lain: meningkatkan kemandirian nelayan melalui dukungan sarana prasarana penangkapan ikan (pasar, dermaga/jeti, pangkalan pendaratan ikan (PPI), pabrik es, *cold storage* dan air bersih dalam menunjang proses dan kelancaran usaha perikanan tangkap) dan pelatihan-pelatihan bagi nelayan melalui pembinaan, magang, guna meningkatkan ketrampilan dan penguasaan teknologi dalam rangka pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang tersedia; meningkatkan kerjasama di bidang sosial dan ekonomi, dengan RDTL.

Kata kunci : ekonomi, kawasan perbatasan, kebijakan

I. PENDAHULUAN

Visi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah terwujudnya tata kelola batas Negara dan kawasan perbatasan yang aman, tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bappenas, 2003 dalam Nugroho, 2012). Salah satu pulau kecil dan merupakan kawasan perbatasan yang pantas mendapat perhatian penuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah Pulau Lirang (Kecamatan Wetar Barat). Pulau Lirang adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di sebelah barat Pulau Wetar dan berbatasan dengan Negara RDTL (Republik Demokratik Timor Leste). Pulau Lirang dapat dijangkau dengan kapal berukuran 425 GT dengan lama perjalanan dari Ambon kurang lebih 6 hari. Masyarakat pulau Lirang dapat melakukan perjalanan laut ke RDTL menggunakan perahu tanpa mesin dan dengan mesin dengan lama perjalanan 1-2 jam. Pilihan terhadap Pulau Lirang didasarkan juga pada aktifitas masyarakat Lirang dan Atauro yang memanfaatkan kawasan ini, lebih menonjol dibandingkan dengan Pulau Letti, Kisar dan Wetar Besar. Pulau Lirang memiliki potensi perikanan yang cukup potensial untuk dimanfaatkan oleh nelayan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih merupakan persoalan besar di Kabupaten Maluku Barat Daya yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah (Far-far, 2010). Rendahnya infrastruktur di Pulau Lirang dapat mengakibatkan lambatnya pengelolaan sumberdaya alam yang tersedia, sehingga perlunya difasilitasi kegiatan pengembangan pada masyarakat, khususnya nelayan berupa pelatihan-pelatihan dalam bidang perikanan dan pengembangan infrastruktur sebagai unsur pendukung peningkatan kualitas SDM.

Kondisi-kondisi yang dikemukakan di atas menjadi hal menarik untuk dikaji, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lirang dengan melihat kondisi ekonomi dan kebijakan pengembangan pada kawasan perbatasan Lirang dan merumuskan strategi pengelolaan dan pengembangan Pulau Lirang sebagai pulau kecil perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ekonomi masyarakat Pulau Lirang; menganalisis kebijakan pengembangan kawasan perbatasan Pulau Lirang; merumuskan strategi pengembangan Pulau Lirang sebagai pulau kecil perbatasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perencanaan pengelolaan dan pengembangan wilayah perbatasan di Maluku Barat Daya secara komprehensif dan memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di kawasan perbatasan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pulau Lirang dan Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya, pada bulan April hingga Juni 2013. Metode analisis yang digunakan meliputi :

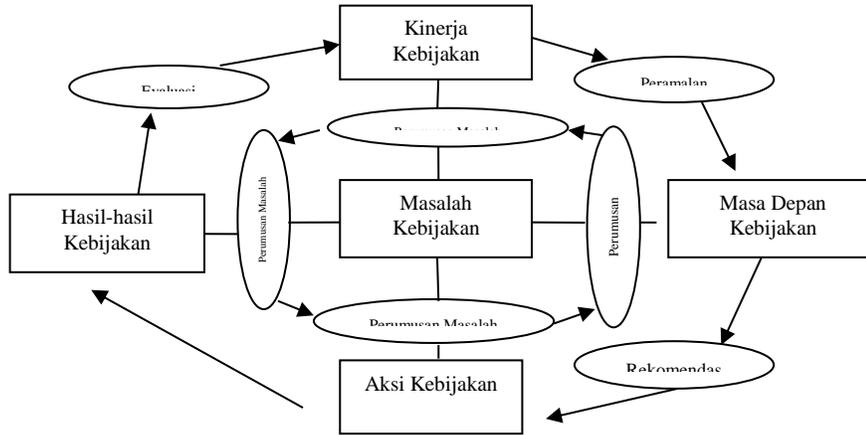
a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Konsep nilai tukar yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan (Basuki, dkk dalam Ustriyana, 2006). Jika NTN lebih kecil dari satu, ini berarti keluarga nelayan mempunyai daya beli lebih rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan berpotensi untuk mengalami defisit anggaran rumah tangganya. Jika NTN berada disekitar angka satu berarti keluarga nelayan hanya mampu mencukupi kebutuhan subsistennya. Jika NTN berada di atas angka satu berarti keluarga nelayan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan subsistennya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya atau menabung dalam bentuk investasi barang. NTN dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{array}{lcl} \text{NTN} & = & Y_t/E_t \quad \text{Dimana:} \\ Y_t & = & Y_{Ft} + Y_{NFt} \quad Y_{Ft} = \text{Total penerimaan nelayan dari usaha perikanan (Rp)} \\ E_t & = & E_{Ft} + E_{Kt} \quad Y_{NFt} = \text{Total penerimaan non nelayan perikanan (Rp)} \\ & & E_{Ft} = \text{Total pengeluaran nelayan untuk konsumsi ke nelayan (Rp)} \\ & & T = \text{Periode waktu (bulan, tahun)} \end{array}$$

b. Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan Lirang dapat dianalisis dengan kebijakan publik Dunn (1994). Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Proses analisis kebijakan publik

c. Analisis SWOT

Berbagai persoalan yang ditemui di lokasi penelitian, akan di analisis menggunakan analisis SWOT (James Ambramsz dalam Rangkuti, 2006) untuk mendapatkan gambaran dalam rangka merumuskan strategi pengembangan kawasan perbatasan. Beberapa penyesuaian dalam pembentukan model analisisnya yaitu:

1. Pembobotan tetap menggunakan skala 1 (sangat penting) hingga 0 (tidak penting), akan tetapi penilaian skala untuk masing-masing situasi total berjumlah 1 dengan cara:
 - a. Urutkan faktor situasi berdasarkan skala prioritas (SP) (tertinggi nilainya 16 dari 4x4, urutan 2 nilainya 12 dari 3x4, dan terendah nilai 4 dari 1x4) lalu dikalikan dengan konstanta (K) nilai tertinggi yaitu 4.
 - b. Masing-masing nilai situasi tersebut di bagi dengan total nilai SPxK.
2. Peringkat tetap menggunakan skala 1 (rendah) - 4 (tinggi) untuk kekuatan dan peluang, sedangkan skala 4 (rendah) -1 (tinggi) untuk kelemahan dan ancaman.
3. Nilai tertinggi dari bobot kali peringkat adalah 1-2 (kuat) dan 0-1 (lemah).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ekonomi Masyarakat

Di kawasan perbatasan Pulau Lirang, sulitnya aksesibilitas memunculkan kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat di Negara RTDL. Minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktifitas sosial ekonominya ke Negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan.

a. Tingkat Kebutuhan Ekonomi Nelayan

Hasil identifikasi lapangan menunjukkan adanya tiga parameter pengeluaran masyarakat nelayan yang utama, antara lain: (1) biaya pendidikan anak (2) konsumsi keluarga dan (3) biaya kesehatan. Walaupun demikian ada tanggungan lain yang turut memberikan pengaruh terhadap tingkat kebutuhan ekonomi nelayan.

Tabel 1. Jenis dan Tingkat Pengeluaran Masyarakat Nelayan Lirang per Jenis Kebutuhan Ekonomi per Bulan

Tingkat Pengeluaran	Pendidikan Anak	Konsumsi Keluarga	Biaya Kesehatan	Tanggungjawab Lain-lain	Jumlah Pengeluaran (Rp)
Minimum	5.000	4.000	0	15.000	24.000
Maksimum	235.000	216.000	20.000	120.000	591.000
Rata-rata	120.000	110.000	10.000	67.500	307.500

Sumber: data primer, diolah

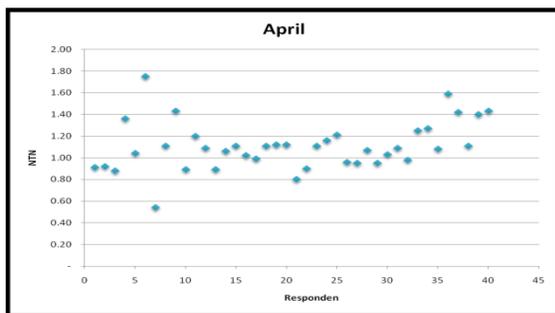
b. Orientasi Pasar

Kecenderungan nelayan untuk menjual hasil tangkapan ke Timor Leste (Atauro dan Dili) disebabkan karena infrastruktur pasar yang kurang memadai. Pasar yang terdapat di desa Ustutun baru difungsikan akhir Juni 2013, tetapi hanya diperuntukkan bagi penjualan hasil kebun (ubi jalar, ubi kayu, kacang-kacangan dan sayur-sayuran). Sedangkan penjualan hasil tangkapan ikan dijual pada tempat-tempat pendaratan ikan, dalam bentuk barter. Transaksi ini terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain: (1). Jarak Lirang-Atauro 4 mil laut dan dapat dijangkau dengan perahu bermotor dan perahu layar dengan lama perjalanan 1-2 jam; (2). Hubungan emosional masyarakat Lirang dengan Atauro; (3). Kepentingan di bidang ekonomi. Sejak pemekaran kecamatan Wetar Barat, pemerintah kecamatan sedang berupaya untuk menghentikan transaksi ini karena dinyatakan illegal. Transaksi ini bisa diputuskan jika, pemerintah daerah menyiapkan pengusaha lokal untuk penanganan hasil tangkapan yang lebih baik. Kondisi perekonomian yang dialami oleh masyarakat Lirang, sampai saat ini belum terjadi kepincangan keamanan di Lirang yang mengakibatkan nelayan beralih ke Timor Leste.

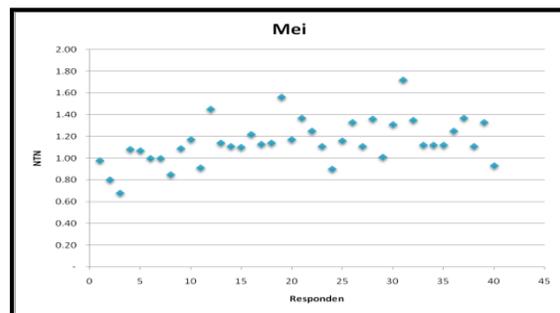
c. Tingkat Kesejahteraan Nelayan

1. NTN (Nilai Tukar Nelayan)

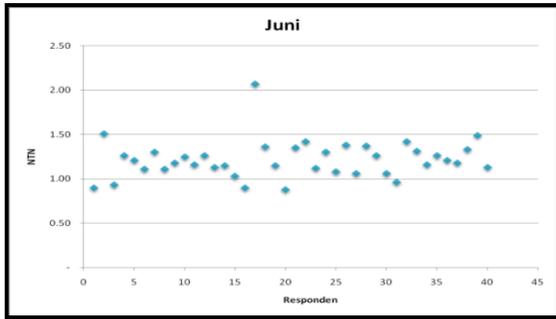
Pada pembahasan tingkat kesejahteraan nelayan di Pulau Lirang akan dihitung NTN dari bulan April, Mei dan Juni. Perhitungan NTN akan dibahas untuk setiap responden nelayan dengan tujuan mendapat gambaran tingkat kesejahteraan pada responden. Gambar di bawah ini akan menggambarkan NTN dari masing-masing nelayan.



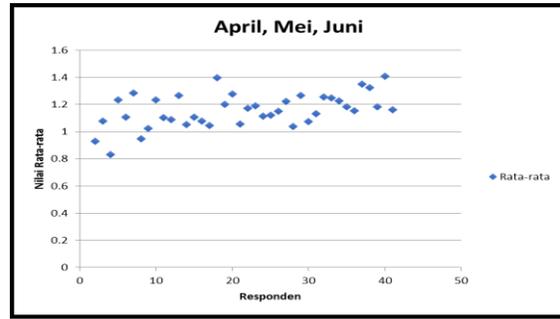
Gambar 2. Distribusi NTN pada bulan April



Gambar 3. Distribusi NTN pada bulan Mei



Gambar 4. Distribusi NTN pada bulan Juni



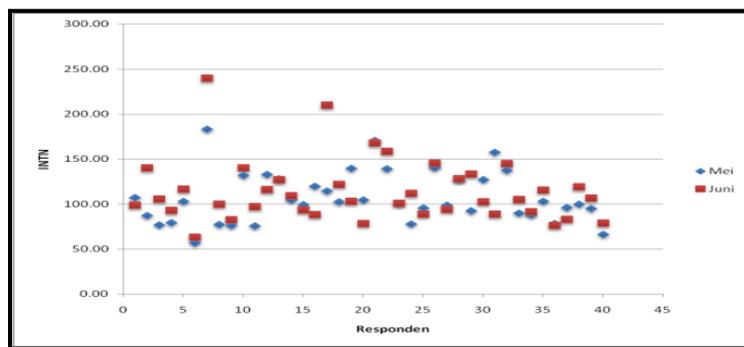
Gambar 5. Nilai rata-rata NTN

Distribusi NTN pada bulan April, Mei dan Juni bervariasi antar nelayan. NTN tertinggi diperoleh nelayan pada bulan Juni sebesar 2,07 dan terendah pada bulan April sebesar 0,54. Sedangkan rata-rata NTN tertinggi yang diperoleh nelayan sebesar 1,40 sedangkan terendah sebesar 0.83. Hasil ini membuktikan bahwa rata-rata NTN pada bulan April, Mei dan Juni di atas angka satu.

Secara umum nelayan Lirang memiliki distribusi NTN di atas angka satu, artinya nelayan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan subsistennya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, atau menabung dalam bentuk investasi barang. Nelayan yang memiliki NTN di bawah satu adalah keluarga nelayan yang mempunyai daya beli lebih rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan berpotensi untuk mengalami defisit anggaran rumah tangganya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan nelayan memiliki NTN yang rendah adalah sarana prasarana tangkap yang terbatas, sehingga jangkauan daerah penangkapan ikan tidak terlalu jauh, orientasi pasar yang hanya tergantung pada nelayan Timor Leste. Nelayan tidak fokus untuk satu pekerjaan mengakibatkan pendapatan nelayan sulit diprediksi.

2. Indeks Nilai Tukar Nelayan

Berdasarkan hasil analisis indeks nilai tukar nelayan terlihat bervariasi. INTN dapat dilihat dari bulan Mei, dan Juni sedangkan bulan April dijadikan sebagai bulan dasar.



Gambar 6. Distribusi INTN

Distribusi INTN yang cenderung meningkat dan menurun, disebabkan karena penghasilan semua nelayan tidak sama dan waktu penangkapan yang berbeda-beda, sehingga hasil tangkapan dan pendapatan nelayan berbeda.

Infrastruktur Ekonomi

1. Sarana Komunikasi

Sarana telekomunikasi yang biasa digunakan masyarakat Lirang adalah ratelda (satu unit). Akibat keterbatasan sarana komunikasi, masyarakat Pulau Lirang sering memilih jaringan komunikasi alternatif pada Negara tetangga Timor Leste. Terkait dengan upaya-upaya mengatasi keterbatasan seperti ini, pemerintah kecamatan telah berupaya membangun pemancar seluler dan mulai difungsikan pada akhir bulan November tahun 2013.

2. Sarana Kelistrikan

Masyarakat di Pulau Lirang sampai saat ini masih menggunakan sumber listrik tenaga surya (LTS). Sumber listrik lainnya yang diakses oleh masyarakat Pulau Lirang melalui penggunaan generator, dan 17 kepala keluarga yang menggunakan generator sebagai sumber listrik. Kondisi terbatas dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik seringkali menjadi bahan perbandingan antara masyarakat Pulau Lirang dengan Timor Leste dengan memberikan pernyataan:

“Walaupun Timor Leste baru merdeka, namun kondisi mereka masih lebih baik dari masyarakat Pulau Lirang. Jika masyarakat Timor Leste dapat menikmati suasana terang benderang di malam hari, maka masyarakat Pulau Lirang hanya mampu menikmati kegelapan di malam hari, sementara terang benderang hanya menjadi tontonan masyarakat Pulau Lirang”.

Kondisi dan pernyataan seperti di atas memberikan konsekuensi tentang pentingnya perhatian serius dari pemerintah Indonesia serta pemerintah Propinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Barat Daya dalam mengakomodasi pembangunan jaringan listrik untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat Pulau Lirang.

3. Infrastruktur Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan keamanan di Pulau Lirang pada umumnya belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Jumlah aparat keamanan di Pulau Lirang dari Pos Angkatan Laut sebanyak 5 orang, dan BKO (Bawah Kendali Operasi) 23 orang.

Dalam penetapan aturan di Pulau Lirang, Angkatan Laut dan BKO mengalami kesulitan yaitu belum disepakatinya garis batas wilayah Indonesia dengan Timor leste, memberi peluang besar bagi masyarakat Timor Leste dan Pulau Lirang dapat melakukan transaksi jual beli ikan dan barang tanpa menggunakan ijin. Sulitnya penerapan aturan di Pulau Lirang membuat masyarakat lebih mengesampingkan aturan dan menciptakan aturan-aturan sendiri yang bagi mereka nyaman untuk diberlakukan.

Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan

1. Masalah Kebijakan

Berikut ini disajikan permasalahan ekonomi di Pulau Lirang antara lain:

- a. Belum jelasnya garis batas wilayah antara Indonesia dengan Negara tetangga.
- b. Rendahnya ketahanan pangan masyarakat.
- c. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi.
- d. Rendahnya akses masyarakat terhadap sumber permodalan.
- e. Rendahnya akses terhadap informasi pasar termasuk promosi potensi unggulan daerah guna menarik investor.

- f. Belum meratanya pembangunan di ibukota kecamatan untuk merangsang pertumbuhan kawasan.
- g. Maraknya pencurian sumberdaya alam di wilayah perbatasan.
- h. Tingginya sirkulasi barang dan jasa di wilayah perbatasan.
- i. Masih rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai di wilayah perbatasan.

2. Hasil Kebijakan

Hasil kebijakan pemerintah yang dirumuskan dalam program-program, dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya kawasan perbatasan antara lain:

- a. Mempercepat penyelesaian garis batas antar Negara dengan Negara tetangga.
- b. Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan sarana dan prasarana.
- c. Meningkatkan pengelolaan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, nasional dan internasional.
- d. Meningkatkan penegakan hukum, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.
- e. Program peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- f. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.
- g. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.
- h. Program pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan.
- i. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

3. Kinerja Kebijakan

Dari keseluruhan kebijakan, hanya 35% program kerja yang terlaksana sesuai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena masalah-masalah yang dihadapi pemerintah daerah, dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi pemerintah, ternyata masih ada peluang besar yang perlu dikembangkan di Pulau Lirang. Peluang tersebut dapat dilihat pada analisis SWOT berikut ini:

4. Masa Depan Kebijakan

Tabel 3. Matriks Lingkungan Strategis (SWOT)

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1. Pulau Lirang merupakan salah satu kawasan perbatasan Negara Kesatuan RI dengan RDTL.	1. Belum jelasnya garis batas wilayah antara Indonesia dengan RDTL.
2. Memiliki potensi sumberdaya alam seperti kebun kelapa, jagung, perternakan, potensi kelautan dan perikanan yang cukup melimpah.	2. Kualitas sumberdaya nelayan rendah.
	3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap.
	4. Rantai/jaringan pasar belum baik.

3. Tersedianya jumlah nelayan yang memadai.
4. Adanya kearifan lokal (sasi).
5. Memiliki kebudayaan yang unik dan sama dengan Negara tetangga.
6. Memiliki POS Angkatan Laut dan BKO.
5. Terbatasnya kelembagaan dan aparat keamanan.
6. Rendahnya infrastruktur ekonomi.

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang (*Opportunities*)

Ancaman (*Threats*)

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki hubungan kekerabatan dengan Negara tetangga. 2. Memiliki sumberdaya pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan yang dapat dikelola dan diekspor ke luar pulau bahkan ke Negara tetangga. 3. Memiliki tempat-tempat pariwisata yang cukup strategis. 4. Kebijakan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah garis batas zona ekonomi eksklusif. 2. Infiltrasi dan imigrasi gelap melalui kegiatan pariwisata. 3. Ketidakstabilan persediaan dan harga barang keperluan masyarakat. 4. Dampak negatif akibat kurangnya infrastruktur ekonomi. |
|---|--|

Tabel 4. Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Faktor-faktor Strategi Internal	SP	K	SP x K	Bobot
Kekuatan (<i>Strengths</i>)				
1. Pulau Lirang merupakan salah satu kawasan perbatasan Negara Kesatuan RI dengan RDTL	4	4	16	16/76=0,2
2. Memiliki potensi sumberdaya alam seperti kebun kelapa, jagung, perternakan, potensi kelautan dan perikanan yang cukup melimpah	4	4	16	16/76=0,2
3. Tersedianya jumlah nelayan yang memadai	3	4	12	12/76=0,1
4. Adanya kearifan lokal (sasi)	2	4	8	8/76=0,1
5. Memiliki kebudayaan yang unik dan sama dengan Negara tetangga	4	4	16	16/76=0,2
6. Memiliki POS Angkatan Laut dan BKO (Bawah Kendali Operasi)	2	4	8	8/76=0,1
T o t a l			76	0,9
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)				
1. Belum jelasnya garis batas wilayah antara Indonesia dengan RDTL	1	4	4	4/52=0,07
2. Kualitas sumberdaya nelayan rendah	2	4	8	8/52=0,1
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	2	4	8	8/52=0,1
4. Rantai/jaringan pasar belum baik	2	4	8	8/52=0,1
5. Terbatasnya kelembagaan dan aparat	2	4	8	8/52=0,1
6. Rendahnya infrastruktur ekonomi	1	4	4	4/52=0,07
T o t a l			40	0,54
<hr/>				
Faktor-faktor Strategi Eksternal	SP	K	SP x K	Bobot
Peluang (<i>Opportunities</i>)				
1. Memiliki hubungan kekerabatan dengan Negara tetangga	4	4	16	16/92=0,1
2. Memiliki sumberdaya pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan yang dapat dikelola dan diekspor ke luar pulau bahkan ke Negara tetangga	3	4	12	12/92=0,1
3. Memiliki tempat-tempat pariwisata yang cukup strategis	4	4	16	16/92=0,1
4. Kebijakan pemerintah melalui Undang-undang nomor 78 Tahun 2005	4	4	16	16/92=0,1

tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar				
T o t a l			60	0,4
Ancaman (<i>Threats</i>)				
1. Masalah garis batas zona ekonomi eksklusif	1	4	4	4/40=0,1
2. Infiltrasi dan imigrasi gelap melalui kegiatan pariwisata	2	4	8	8/40=0,2
3. Ketidak stabilan persediaan dan harga barang keperluan masyarakat	2	4	8	8/40=0,2
4. Dampak negatif akibat kurangnya infrastruktur ekonomi.	1	4	4	4/40=0,1
T o t a l			24	0,6

Hasil analisis yang menunjukkan adanya interaksi antara seluruh komponen lingkungan internal dan eksternal dan dapat menghasilkan strategi pengembangan kawasan perbatasan Pulau Lirang. Hasil analisis ini menunjukkan sedikit terdapat 15 strategi pengembangan, sebagaimana di bawah ini:

STRATEGI (S-O)

1. Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang ekonomi.
2. Optimalisasi usaha di bidang perikanan, dan maksimalkan pengembangan wilayah.
3. Meningkatkan kemandirian nelayan melalui dukungan sarana penangkapan ikan dan pelatihan bagi nelayan.
4. Penetapan undang-undang perbatasan Negara.

STRATEGI (S-T)

1. Meningkatkan ketahanan wilayah nasional.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi secara selektif dan bertahap.
3. Pemberdayaan kelembagaan adat masyarakat perbatasan dalam fungsi pengawasan.
4. Membangun sarana dan prasarana pengawasan serta keamanan di kawasan perbatasan Lirang.

STRATEGI (W-O)

1. Percepatan penyelesaian tapal batas.
2. Peningkatan sumberdaya nelayan melalui pembinaan, pelatihan dan magang, guna meningkatkan ketrampilan dan penguasaan teknologi.
3. Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan pendukung usaha perikanan tangkap.
4. Membangun jaringan pemasaran guna mendekatkan pasar dengan sumber produksi.

STRATEGI (W-T)

1. Membangun pos-pos keamanan di kawasan perbatasan dan peningkatan frekuensi patroli keamanan di kawasan perbatasan.
2. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di kawasan perbatasan.
3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan.

5. Aksi Kebijakan

Aksi kebijakan yang dimaksudkan adalah arahan-arahan pengembangan kawasan perbatasan Pulau Lirang yang berbasis pada seluruh rumusan strategi yang dihasilkan di atas. Arahan-arahan yang terkait dengan strategi pemanfaatan potensi atau kekuatan dalam memanfaatkan peluang yang ada meliputi

empat strategi dengan berbagai arahan pengembangannya. *Pertama*, meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan keamanan dengan Timor Leste. Arahannya adalah pengembangan kawasan perbatasan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kerja sama dengan Negara tetangga. *Kedua*. Optimalisasi usaha di bidang perikanan, dan maksimalkan pengembangan wilayah, melalui peningkatan kapasitas usaha penangkapan ikan dengan menambah alat tangkap yang ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik dan potensi sumberdaya yang ada, dan mengembangkan wilayah dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada. *Ketiga*, meningkatkan kemandirian nelayan melalui dukungan sarana penangkapan ikan dan pelatihan-pelatihan bagi nelayan dan melalui dukungan modal usaha. *Keempat*. Penetapan undang-undang perbatasan Negara bertujuan untuk menekankan pengembangan wilayah perbatasan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional.

Kelompok arahan pengembangan yang didasarkan pada strategi penggunaan kekuatan untuk menghadapi ancaman atau tantangan. Hasil ini memberikan konsekuensi terhadap beberapa kelompok arahan pengembangan. *Pertama*. Meningkatkan ketahanan wilayah nasional dengan arahan peningkatan ketahanan wilayah nasional masyarakat di perbatasan agar tidak mengalami penurunan wawasan kebangsaan dan rasa bela Negara. *Kedua*. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi secara selektif dan bertahap. Arahannya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. *Ketiga*. Pemberdayaan kelembagaan adat masyarakat perbatasan dalam fungsi pengawasan. Arahannya adalah melibatkan kelembagaan yang ada di kawasan perbatasan Lirang, baik dalam pelatihan-pelatihan maupun pelaksanaan program-program terkait kawasan perbatasan. *Keempat*. Membangun sarana dan prasarana pengawasan serta keamanan di Kawasan perbatasan Lirang. Arahan pentingnya adalah memperketat pengamanan dan pengawasan terhadap para pelaku penyelundupan dan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya di wilayah perbatasan.

Kelompok arahan pengembangan yang berbasis pada upaya mereduksi kelemahan untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang. *Pertama*. Percepatan penyelesaian tapal batas, dengan arahan mempertegas kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste maupun Australia. *Kedua*. Peningkatan sumberdaya nelayan melalui pembinaan, pelatihan dan magang, guna meningkatkan ketrampilan dan penguasaan teknologi teknologi dalam rangka pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang tersedia. *Ketiga*. Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana ekonomi pendukung usaha perikanan tangkap seperti jaringan listrik, air, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, pasar, dermaga/jeti, pangkalan pendaratan ikan (PPI), pabrik es, cold storage dan air bersih dalam menunjang proses dan kelancaran usaha perikanan tangkap. *Keempat*. Membangun jaringan pemasaran guna mendekatkan pasar dengan sumber produksi, disamping peningkatan sarana transportasi antar pulau melalui laut dan darat.

Kelompok arahan pengembangan dengan mereduksi kelemahan dan menghindari ancaman. *Pertama*, peningkatan frekuensi patroli keamanan di kawasan perbatasan bertujuan untuk keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan. Arahannya adalah membangun pos-pos keamanan dan peningkatan armada patroli yang dimiliki, serta prasarana pengamanan dan pengawasan perbatasan seperti pos perbatasan, imigrasi, bea cukai, dan pos keamanan di pulau-pulau terluar sebagai pintu gerbang NKRI dengan Negara tetangga. *Kedua*. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di kawasan perbatasan agar meningkatkan rasa kecintaan dan bela Negara terhadap bangsa. *Ketiga*. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan. Arahannya adalah memperluas ketersediaan sarana dan prasarana dilakukan dengan memperbanyak sarana dan prasarana maupun meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana yang sudah ada.

KESIMPULAN

Penelitian tentang Pengembangan Pulau Kecil Perbatasan (Kajian ekonomi dan Kebijakan Pada Pulau Lirang) memberikan beberapa rumusan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum nelayan Lirang yang adalah nelayan perbatasan memiliki distribusi NTN di atas angka satu, dan dapat disimpulkan bahwa nelayan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan subsistennya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, atau menabung dalam bentuk investasi barang. Masih rendahnya infrastruktur ekonomi di kawasan perbatasan Lirang.
2. Beberapa kebijakan yang turut mendukung pengembangan Pulau Lirang sebagai Pulau kecil perbatasan, dengan sasaran-sasaran antara lain: (a) Terwujudnya keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah Negara; (b) Menurunnya kegiatan *illegal* dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan; (d) Meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi dan perikanan; (e) Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat perbatasan yang ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya pendapatan nelayan.
3. Rumusan strategi yang sangat penting dalam pengembangan Pulau Lirang adalah: (a) Peningkatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di kawasan perbatasan; (b) Optimalisasi usaha di bidang perikanan dan maksimalkan pengembangan wilayah; (c) Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial dan ekonomi, dengan negara tetangga.

DAFTAR PUSTAKA

- _____.1994.TahaptahapPembuatanKebijakanPublikMenurutWilliamDunn.[http://dinamikakebijakanpublik.blogspot.com/2011/10/tahap-tahap-pembuatan-kebijakan publik.html](http://dinamikakebijakanpublik.blogspot.com/2011/10/tahap-tahap-pembuatan-kebijakan-publik.html). [08-03-2013]
- Abrahamsz, J., 2007. Analisis Lingkungan (SWOT) dan Analisis Strategis (TOWS). <http://www.dkp.go.id/http://www.go.id/>. 27 November 2007: 8 hal. [12-12-2013]
- Bappenas. 2008. <http://www.bappenas.go.id/node/108/828/kawasan-perbatasan-kebijakan-dan-strategi-nasional-pengelolaan-kawasan-perbatasan-antarnegara-di-indonesia/> [31-01-2013]
- Far-far, R., 2010. Model Pencegahan Perikanan Ilegal Melalui Pengelolaan Pulau- pulau Terluar: Pulau Lirang, Wetar dan Lirang di Provinsi Maluku. Disertasi. Bogor.
- Haryono, D., Indo. 2007. Konflik perbatasan negara di kawasan asia pacifik. <http://penataanruang.pu.go.id/taru/Makalah/PulauKecil.doc>, [05-05-2013]
- Nugroho, I., 2012. Wilayah Perbatasan dan Daya Saing Ekonomi. <http://widyagama.ac.id/iwan-nugroho/2012/09/wilayah-perbatasan-dan-daya-saing-ekonomi/> [05-03-2013]
- Rangkuti, F., 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk menghadapi Abad 21. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ustriyana, 2006. Model dan Pengukuran Nilai Tukar Nelayan (Kasus Kabupaten Karangasem) Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Udayana.